



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2021**

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, komprehensif, dan responsif sesuai dengan jenjang perencanaan, yakni perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) OPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang bertujuan untuk mengoperasionalisasikan RKPD dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsinya. Renja OPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk periode 1 (satu) tahun.

Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 memuat evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020 dan tahun berjalan, program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran serta sumber dana yang dibutuhkan untuk tahun 2022. Sebagai satuan organisasi perangkat daerah yang mendukung pemerintah Kabupaten Pasaman Barat di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, DLH mempunyai tugas yang sangat strategis antara lain, perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup, kehutanan, kebersihan dan pertamanan.

Selanjutnya, Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 akan menjadi landasan dan pedoman bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16/SJ tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020.
9. Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.4/Menlhk/Setjen/KUM.1/4/2021 tentang Penetapan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berwawasan Lingkungan.
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 07 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2005-2025
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pasaman Barat tahun 2011-2031
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaaan 1 (satu) tahunan yang memuat program dan kegiatan terukur sebagai dasar untuk penilaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup serta sebagai perangkat untuk menciptakan perencanaan pembangunan yang sinkron pada Tahun 2022.

Adapun tujuan penyusunan Recana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan tugas dan fungsi dinas sebagai lembaga pengelola lingkungan hidup dan kehutanan, baik Bidang Penataan Penaatan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Peningkatan Kapasitas; Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; Bidang Kebersihan dan Pertamanan maupun Bidang Kehutanan.
2. Menyelaraskan target program dan kegiatan tahunan dengan program dan kegiatan yang telah disusun pada Renstra OPD.
3. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai wujud dari upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Mengingat arti strategis Renja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal penyusunan hingga penetapan dokumen Renja DLH Tahun 2022 mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, memuat ketentuan antara lain:

- 1) Memuat program, kegiatan lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD;

- 2) Berpedoman pada Renstra OPD dengan tujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja;
- 3) Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja tahun berjalan, bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun pada rancangan awal Renja adalah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra;
- 4) Program dan Kegiatan dalam RENJA harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD serta disusun selaras dengan program dan kegiatan yang telah disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam Forum Musrenbang;
- 5) Renja disajikan paling sedikit memuat pendahuluan; hasil evaluasi Renja tahun lalu; tujuan dan sasaran; rencana kerja dan pendanaan; dan penutup.
- 6) Dokumen Renja akan menjadi bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD dan menjadi rancangan RKPD Pemeritah Daerah.

Adapun sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) OPD diuraikan sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

- 1.1 *Latar Belakang*, Menguraikan gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD, pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
- 1.2 *Landasan Hukum*, memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.
- 1.3 *Maksud dan Tujuan*, Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD.
- 1.4 *Sistematika Penulisan*, Menguraikan pokok bahasan dalam

penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2019

- 2.1 *Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD*, Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya, capaian Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.
- 2.2 *Analisis Kinerja Pelayanan OPD*, memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.
- 2.3 *Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD*, memuat sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait; permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, dan terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Developmnet Goals*); tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis.
- 2.4 *Review terhadap Rancangan Awal RKPD*, Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; dan penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut.
- 2.5 *Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat*, menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari masyarakat, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun berdasarkan pelaksanaan musrenbang.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN OPD

- 3.1 *Telaahan terhadap Kebijakan Nasional*, memuat penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan tugas pokok dan fungsi OPD.
- 3.2 *Tujuan dan sasaran Renja OPD*, didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.
- 3.3 *Program dan Kegiatan*, memuat faktor-faktor yang menjadi bahan

pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, total kebutuhan dana/pagu indikatif, dan penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat uraian tentang rencana kerja dan pendanaan masing-masing program/kegiatan yang mendukung tupoksi OPD dan prioritas pembangunan Pemerintah Daerah

BAB V : PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja OPD bertujuan untuk menilai apakah program-program pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan target kinerja OPD yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) OPD. Evaluasi juga diperlukan untuk mengetahui permasalahan atau kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, dan sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan rencana kerja program pada tahun anggaran berikutnya berdasarkan tolok ukur yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2020, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan 7 (tujuh) program yang terdiri dari 15 kegiatan. Sementara untuk tahun 2021 dengan digunakannya aplikasi SIPD maka DLH Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan 8 (delapan) Program yang terdiri dari 14 (empat belas) kegiatan dan 25 (dua puluh lima) sub kegiatan.

Evaluasi pelaksanaan Renja DLH tahun 2020 memuat pencapaian target kinerja tahun 2020 berdasarkan rencana kerja sebagaimana telah disusun. Sedangkan, evaluasi pelaksanaan Renja DLH tahun 2021 memuat perkiraan capaian kinerja pada tahun berjalan, yang kemudian dikaitkan dengan pencapaian target Renstra DLH pada tahun sebelumnya serta yang akan datang

Adapun informasi yang akan didapatkan melalui evaluasi pelaksanaan Renstra DLH sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi/melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD; dan
5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Hasil evaluasi terhadap realisasi capaian kinerja DLH pada tahun 2020 serta perkiraan capaian kinerja tahun berjalan (TA 2021) disajikan pada Tabel 2.1.1 dan Tabel 2.1.2 di bawah ini :

Tabel 2.1.1. (T-C.29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan
Pencapaian Renstra OPD s.d. Tahun 2021
Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
Kabupaten Pasaman Barat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan(Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Th 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2019	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program Dan Kegiatan (Renja OPD Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD S.D. Tahun 2021			
					Target Renja OPD Tahun 2020	Realisasi Renja OPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)		
2	5	15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Cakupan wilayah kecamatan yang dilayani dalam pengangkutan sampah ke TPA	5 kecamatan	2 kecamatan	3 kecamatan	2 kecamatan	66,67 %	3 kecamatan	3 kecamatan	90 %
				Persentase jumlah sampah yang tertangani	40 %	27,75 %	30 %	27,58	91,93 %	40 %	27,19	67,97 %
			Kegiatan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Persentase pemenuhan kebutuhan peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	5	16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	persentase usaha/kegiatan yang taat terhadap pelaksanaan Izin Lingkungan (IL) dan IPPLH	90 %	86,67 %	86,67 %	86,67 %	100 %	92,86 %	92,86 %	100 %
			Kegiatan Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	Jumlah objek yang diawasi dan dibina	56 objek	47 objek	40 objek	40 objek	100 %	30 objek	30 objek	100 %

		Kegiatan Pengkajian dampak lingkungan	Persentase pengkajian dampak lingkungan yang difasilitasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
		Kegiatan Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Akibat Dugaan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
		Kegiatan Pembinaan sekolah berbasis lingkungan hidup (adiwiyata)	Jumlah sekolah Adiwiyata yang terbina	0	0	6 sekolah	6 sekolah	100 %	-	-	-	
2	5	17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor, sumber mata air dan kawasan mangrove	32 %	15 %	15 %	15 %	100 %	15 %	15 %	100 %
		Kegiatan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Jumlah kampung iklim yang dibina	0	0	4 kampung iklim	0	0	0	0	0	
2	5	20	Program peningkatan pengendalian polusi	Indeks Kualitas Air	80	80	80	80	100 %	80	80	100 %
			Indeks Kualitas Udara	90	92,77	90	93,86	104,29%	90	92	102,22 %	
		Kegiatan Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri	Jumlah objek pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri	15 objek	100 %	15 objek	15 objek	100	0	0	0	
		Kegiatan Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair	Jumlah objek pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair	25 objek	100 %	25 objek	25 objek	100	25 objek	100	100 %	
		Kegiatan Pengujian kualitas air sungai	Jumlah sungai yang diuji kualitasnya	2 sungai	100 %	2 sungai	2 sungai	100 %	2 sungai	2 sungai	100 %	

2	5	24	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	RTH yang dikelola	6 lokasi	5 lokasi	5 lokasi	5 lokasi	100 %	6 lokasi	6 lokasi	100 %
			Kegiatan Pemeliharaan RTH	Lokasi RTH yang dipelihara	6 lokasi	5 lokasi	6 lokasi	6 lokasi	100 %	6 lokasi	6 lokasi	100 %
2	5	17	Program Pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Persentase PJU dalam Kondisi Baik	93 %	86,14 %	90 %	90 %	100 %	Pindah ke DISHUB	Pindah ke DISHUB	Pindah ke DISHUB
2	5	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Level Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	100 %	Level 3	Level 3	100 %
				Skoring Penilaian LKj/SAKIP	B	B	B	B	100 %	B	B	100 %
				Skoring penilaian LPPD	-	-	3,06	3,06	100 %	-	-	-
			Kegiatan Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan kebutuhan administrasi perkantoran	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Dan Prasarana Perkantoran Dan Aparatur	Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara	40 unit	100 %	40 unit	100 %	100 %	40 unit	100 %	100 %
			Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi	Persentase pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	65 kali	100%	100 %	65 kali	100%	65 kali	100%	65 kali
2	5	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Jumlah pengadaan satama dan prasarana penunjang								

			Aparatur									
			Kegiatan Pengadaan Peralatan/Kendaraan Dan Mesin	Jumlah pengadaan satana dan prasarana penunjang	2 unit	100 %	2 unit	100 %	100%	2 unit	100 %	100%
2	5	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti Bintek peningkatan kapasitas	6 orang	100 %	6 orang	100%	100 %	6 orang	100%	6 orang
			Kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek/diklat	6 orang	100 %	6 orang	100%	100 %	6 orang	100%	6 orang

Tabel 2.1.2.
Evaluasi Realisasi Kinerja DLH Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020

INDIKATOR KINERJA			Target	Realisasi Target	% Capaian Target (Realisasi Fisik)
I	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan				
	1	Peningkatan operasi & pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	100 %	100 %	100
	2	Optimalisasi Persiapan Penilaian Adipura	70 %	70 %	100
II	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH				
	3	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	47 objek	47 objek	100
	4	Pengkajian dampak lingkungan	10 dokumen	12 dokumen	120
	5	Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Akibat Dugaan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	10 kasus	6 kasus	100 (semua laporan yang masuk ditindaklanjuti)
	6	Pembinaan Sekolah Berbasis Lingkungan Hidup (Adiwiyata)	5 sekolah	12 sekolah	240
	7	Optimalisasi Pengembangan Data dan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan	1 dokumen	1 dokumen	100
III	Program Perlindungan dan Konservasi SDA				
	8	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	2 kampung/nagari	3 kampung/nagari	150
IV	Program Peningkatan Pengendalian Polusi				
	9	Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri	13 objek	13 objek	100
	10	Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair	25 objek	25 objek	100
	11	Pengujian kualitas air sungai	2 sungai	2 sungai	100
V	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)				
	12	Pemeliharaan RTH	1 lokasi	1 lokasi	100
VI	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan				
	13	Pemeliharaan sarana dan prasarana Penerangan Jalan Umum (PJU)	850 titik	850 titik	100
VII	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
	14	Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	100 %	100
	15	Penyediaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Perkantoran dan Aparatur	65 %	65 %	100
	16	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 bulan	12 bulan	100

VIII	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
	17	Pengadaan Perlengkapan Kantor dan Rumah Jabatan		1 unit	1 unit 100
IX	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				
	18	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan		2 orang	2 orang 100

Berdasarkan Tabel 2.1.1. dan 2.1.2. dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2020, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan 6 (enam) program teknis dan 3 (tiga) program rutin dengan jumlah kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 18 kegiatan. Program/kegiatan yang dilaksanakan tersebut mendukung pencapaian 4 sasaran yang dijabarkan kedalam 6 indikator sesuai Perubahan Rencana Strategis (Renstra) DLH Tahun 2016-2022, yaitu :

Tabel 2.1.3.
Penilaian Capaian Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020

Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Rasio Capaian	Predikat
1. Capaian Nilai Adipura Kabupaten	70	0	0 %	Tidak ada penilaian karena Pandemi Covid 19
2. Persentase usaha/kegiatan yang dibina dan diawasi terkait pelaksanaan Izin Lingkungan	89	92,86	104,34 %	Sangat Baik
3. Jumlah Penghargaan lingkungan tingkat propinsi dan nasional yang diperoleh	5	0	0 %	Tidak ada Penilaian Provinsi/ Pusat karena Covid 19
4. Level Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	100 %	Sangat Baik
5. Opini terhadap laporan keuangan OPD	WTP	WTP	100 %	Sangat Baik
6. NILAI SAKIP	B	B	100 %	Sangat Baik

Hasil capaian atas 6 indikator kinerja sasaran dalam beberapa klasifikasi pengukuran/penilaian sebagaimana uraian pada Tabel 2.2. dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Terlaksana dengan prediket “sangat baik” sebanyak 4 indikator;
- Terlaksana dengan prediket “baik” sebanyak 0 indikator;
- Terlaksana dengan prediket “kurang baik” sebanyak 0 indikator;
- Terdapat 2 (dua) indikator yang tidak dapat dilaksanakan karena adanya wabah pandemi Covid 19.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Berdasarkan Peraturan Bupati Pasaman Barat nomor 83 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memiliki tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pada perubahan RPJMD tahun 2016-2021, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat mendukung Pencapaian Misi Ke-VI (ke enam) yakni :

Tabel 2.2.1.

Tujuan Pembangunan yang mengacu pada Misi Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2021

Misi	Tujuan Misi	Sasaran Misi	Tujuan DLH
Mewujudkan pembangunan wilayah yang berkeadilan, serta mengelola Sumber Daya Alam dan penataan ruang secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Pengelolaan sumber daya alam sesuai penataan ruang dan berwawasan lingkungan	Terciptanya lingkungan hidup berkualitas	<u>Indikator :</u> Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Sumber : DLH Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021

Uraian tugas pokok dan fungsi DLH dilaksanakan dan diukur dalam pernyataan indikator sasaran Kepala DLH yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) DLH tahun 2016-2021. Pengukuran pencapaian target kinerja DLH Kab. Pasaman Barat hingga tahun 2020 dan proyeksi pencapaian pada tahun 2021 diuraikan pada Tabel 2.2.2.

Tabel 2.2.2. (T-C.30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan DLH Kab. Pasaman Barat

No.	Indikator	SPM / standar nasional	IKK	Target Renstra DLH				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	Capaian Nilai Adipura Kabupaten			60	69	70	71	60,06	Tidak Lolos	60,06	60,10	Tidak ada penilaian karena Covid 19
2	Percentase usaha/kegiatan yang dibina dan diawasi terkait pelaksanaan Izin Lingkungan			87 %	88 %	89 %	90 %	86,67 %	92,86 %	92,86 %	92,86 %	
3	Jumlah Penghargaan lingkungan tingkat propinsi dan nasional yang diperoleh			2	3	5	7	2	0	1	2	
4	Level Maturitas SPIP			NA	Level 3	Level 3	Level 3	NA	Level 2	Level 3	Level 3	
5	Opini terhadap laporan keuangan OPD			NA	WTP	WTP	WTP	NA	WTP	WTP	WTP	
6	NILAI SAKIP			NA	B	B	B	NA	B	B	B	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi OPD

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, dinas lingkungan hidup kabupaten pasaman barat dihadapkan pada sejumlah isu-isu penting yang berimplikasi terhadap penyelenggaraan urusan lingkungan hidup dan kehutanan di daerah. Adapun isu-isu penting yang perlu mendapat perhatian adalah:

- 1) Minimnya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang ada, baik Truck sampah, Becak sampah maupun kontainer sampah sehingga belum optimalnya kinerja pelayanan persampahan di Kabupaten Pasaman Barat.
- 2) Permasalahan sertifikasi lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah yang belum tuntas sehingga menjadi penghalang untuk proses pengajuan proposal bantuan pembangunan fisik melalui dana APBN.
- 3) Minimnya anggaran untuk mengoptimalkan kinerja laboratorium lingkungan DLH Kabupaten Pasaman Barat sehingga kita masih menggunakan jasa laboratorium terakreditasi di Kabupaten/ Kota lain di Sumatera Barat.
- 4) Rendahnya partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan, misalnya dalam hal penanganan sampah, perlindungan tanaman dan hutan, serta upaya mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim.

2.4. Telaahan Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat pada Tahun Anggaran 2022 membutuhkan dana sebesar **Rp.7.299.678.930** (*Tujuh milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah*) yang akan dialokasikan untuk menunjang pencapaian 9 (sembilan) program, 14 (empat belas) kegiatan dan 24 (dua puluh empat) sub kegiatan DLH dengan mengacu pada Renstra DLH 2016-2022.

Adapun telaahan terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2022 dapat disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.4. (T-C.31)
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
Kabupaten Pasaman Barat

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting (Penjelasan)
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. PasBar	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	100 %	4.400.608.031				4.400.608.031	
	<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	DLH Kab. PasBar	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	4.009.126.981				4.009.126.981	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DLH Kab. PasBar	Jumlah ASN yang mendapat gaji dan tunjangan	39 orang	3.811.076.981				3.811.076.981	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	DLH Kab. PasBar	Jumlah Non PNS (PTT dan THL) penunjang administrasi perkantoran	1 PTT dan 20 THL	122.150.000				122.150.000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi DLH	DLH Kab. PasBar	Penyediaan honorarium petugas pengelola keuangan	12 bulan	75.900.000				75.900.000	
	<i>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	DLH Kab. PasBar	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	53.600.000				53.600.000	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	DLH Kab. PasBar	Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan	2 orang	36.700.000				36.700.000	

			pengamanan BMD pada DLH							
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	DLH Kab. PasBar	Jumlah ASN penatausahaan BMD	1 PNS dan 1 THL	16.900.000				16.900.000	
	<i>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	Kab. PasBar	Jumlah ASN yangmengikuti bintek peningkatan kapasitas	5 orang	7.180.000				7.180.000	
	Bimbingan Teknis Impleentasi Peraturan Perundang-undangan	Kab. PasBar	Jumlah ASN yangmengikuti bintek peningkatan kapasitas	5 orang	7.180.000				7.180.000	
	<i>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	DLH Kab. PasBar	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	143.209.750				143.209.750	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DLH Kab. PasBar	Jumlah pemenuhan kebutuhan penerangan dan instalasi listrik penunjang operasional kantor	1 paket	3.110.000				3.110.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DLH Kab. PasBar	Jumlah ATK dan kertas yang dibutuhkan	1 paket	20.000.000				20.000.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DLH Kab. PasBar	Jumlah blanko SPT, SPPD, kuitansi dan Map DLH yang dibutuhkan	1 paket	9.888.250				9.888.250	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. PasBar	Jumlah rapat koordinasi dari pemerintah provinsi dan pusat yang diikuti	45 kali	110.211.500				110.211.500	

	<i>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	DLH Kab. PasBar	Cakupan terpenuhinya kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	71.461.300				71.461.300	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DLH Kab. PasBar	Frekuensi penyediaan kebutuhan listrik dan air untuk operasional kantor	12 bulan	43.205.500				43.205.500	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DLH Kab. PasBar	Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan tugas K3 dan penyediaan peralatan penunjang kebersihan kantor	2 orang dan 12 bulan	28.255.800				28.255.800	
	<i>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	DLH Kab. PasBar	Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara	57 unit	116.030.000				116.030.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DLH Kab. PasBar	Jumlah kendaraan dinas yang akan dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajak/KIR	37 unit	64.515.000				64.515.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DLH Kab. PasBar	Jumlah kendaraan operasional yang akan dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajak/KIR	15 unit	16.600.000				16.600.000	

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DLH Kab. PasBar	Jumlah alat elektronik yang penunjang operasional administrasi perkantoran yang dipelihara	34 unit	28.715.000				28.715.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DLH Kab. PasBar	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	2 unit	6.200.000				6.200.000	
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Kab. PasBar	Dokumen RPPLH yang disusun	0 dokumen	233.286.300				233.286.300	
	<i>Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota</i>	Kab. PasBar	Dokumen RPPLH yang disusun	0 dokumen	233.286.300				233.286.300	
	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Kab. PasBar	Dokumen RPPLH yang disusun	0 dokumen	233.286.300				233.286.300	Mengakomo dir KLHS RTRW
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Kab. PasBar	Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU)	55.89 dan 90.34	68.471.750				68.471.750	
	<i>Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</i>	Kab. PasBar	Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU)	55.89 dan 90.34	68.471.750				68.471.750	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kab. PasBar	Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU)	55.89 dan 90.34	68.471.750				68.471.750	

	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Kab. PasBar	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	50.84	808.691.599				808.691.599	
	Kegiatan Pengelolaan Keanelekragaman Hayati Kabupaten/Kota	Kab. PasBar	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	50.84	808.691.599				808.691.599	
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kab. PasBar	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	50.84	808.691.599				808.691.599	
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Kab. PasBar	Persentase verifikasi pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan B3 danLB3	100%	3.773.750				3.773.750	
	Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kab. PasBar	Persentase verifikasi pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan B3 danLB3	100%	3.773.750				3.773.750	
	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kab. PasBar	Jumlah verifikasi lapangan penyimpanan sementara limbah B3	2 objek	3.773.750				3.773.750	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Kab. PasBar	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	93%	96.231.750				96.231.750	

	<i>Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	Kab. PasBar	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	93%	96.231.750				96.231.750	
	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Kab. PasBar	Jumlah fasilitasi izin lingkungan (IL) dan IPPLH lainnya	5 objek	30.257.250				30.257.250	
	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. PasBar	Jumlah objek yang dibina dan diawasi	49 objek	65.974.500				65.974.500	
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Kab. PasBar	Jumlah penghargaan bidang lingkungan hidup yang diberikan kepada masyarakat	15 penghargaan	23.845.750				23.845.750	
	<i>Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	Kab. PasBar	Jumlah penghargaan bidang lingkungan hidup yang diberikan kepada masyarakat	15 penghargaan	23.845.750				23.845.750	
	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kab. PasBar	Jumlah penghargaan bidang lingkungan hidup yang diberikan kepada masyarakat	15 penghargaan	23.845.750				23.845.750	
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Kab. PasBar	Persentase pengaduan masyarakat yang	100 %	27.442.000				27.442.000	

			ditindaklanjuti							
	<i>Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota</i>	Kab. PasBar	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	27.442.000				27.442.000	
	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Kab. PasBar	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	27.442.000				27.442.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Kab. PasBar	Persentase sampah yang tertangani	28,25%	1.637.328.000				1.637.328.000	
	Kegiatan Pengelolaan Sampah	Kab. PasBar	Persentase sampah yang tertangani	28,25%	1.637.328.000				1.637.328.000	
	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kab. PasBar	Persentase sampah yang tertangani	28,25%	1.637.328.000				1.637.328.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dari Masyarakat

Dinas Lingkungan Hidup melalui kegiatan Forum OPD yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 telah menerima masukan dari beberapa Kecamatan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel T-C.32.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Kabupaten Pasaman Barat

Nama Perangkat Daerah	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
Kecamatan Sasak Ranah Pasisie	Penanaman pohon cemara udang dan mangrove	Nagari Sasak		2000 pohon	Akan diusulkan melalui Dishut Provinsi
Kecamatan Sungai Beremas	Pengadaan Mobil Sampah			1 unit	Akan diusulkan melalui APBN
Kecamatan Luhak Nan Duo	Kegiatan Reboisasi	Giri Maju		1000 batang	Akan diusulkan melalui Dishut Provinsi
Kecamatan Ranah Batahan	Pengadaan Pot sepanjang Jalan Lintas Silaping	Silaping		500 buah	
Kecamatan Talamau	Pelatihan Daur Ulang Sampah	Tanjung Beruang		40 orang	Kerjasama nagari dengan DLH dalam hal pembiayaannya
Kecamatan Talamau	Pengolahan sampahan organik untuk Merchandise	Sinuruik		700 m	Kerjasama nagari dengan DLH dalam hal pembiayaannya
Kecamatan Lembah Melintang	Pengadaan Becak Motor Sampah	Ujung Gading		2 unit	Kerjasama nagari dengan DLH dalam hal pembiayaannya

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 adalah : (1) Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 66,5-68,6, angka pada tahun 2019 sebesar 63,42. Anasir utama pembangun dari besarnya indeks ini yang akan ditangani, yaitu air, udara dan tutupan hutan; (2) Memanfaatkan potensi Sumber daya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, dengan indikator kinerja peningkatan kontribusi SDH dan LH terhadap devisa dan PNBP. Komponen pengungkit yang akan ditangani yaitu produksi hasil hutan, baik kayu maupun non kayu (termasuk tumbuhan dan satwa liar) dan eksport; dan, (3) Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan indikator kinerja derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun. Kinerja ini merupakan agregasi berbagai penanda (penurunan jumlah hotspot kebakaran hutan dan lahan, peningkatan populasi spesies terancam punah, peningkatan kawasan ekosistem esensial yang dikelola oleh para pihak, penurunan konsumsi bahan perisik ozon, dan lain-lain). (4) Secara substansi bahwa sasaran Renstra KLHK 2020–2024, sangat relevan dan sinergis dengan sasaran Renstra DLH Kabupaten Pasaman Barat 2016–2021 dalam mendukung pencapaian misi ke 6 RPJMD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016–2021.

Tabel 3.2 Telaahan terhadap Renstra Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2019 – 2024

NO	PEMBANGUNAN	BASELINE 2019	SASARAN 2024
3. SASARAN PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN			
Ketahanan Air, Infrastruktur Dasar dan Konektivitas			
3	Lingkungan		
a.	Emisi Gas Rumah Kaca	15,5%	~ 26%
b.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	63,0-64,0	66,5-68,5
c.	Tambahan Rehabilitasi Hutan	2 juta ha (dalam dan luar kawasan)	750 ribu ha (dalam kawasan)

Sumber : Renstra KLHK 2020-2024

Tabel 3.1.
Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi

No.	Kebijakan Nasional/Provinsi	Sumber	Ket
I	Nasional		
3.	Pemerataan dan Kewilayahannya	RKP 2019	
3.14	Desa dan kawasan pedesaan	RKP 2019	
3.14.7	Pengelolaan sumber daya alam desa dan kawasan transmigrasi dan sumber daya hutan : 3. Rehabilitasi kawasan perdesaan yang tercemar lingkungan, terkena dampak bencana serta perubahan iklim. 4. Penguatan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam pemanfaatan sumber daya alam, pengelolaan lingkungan hidup dan teknologi tepat guna.	RKP 2019	
III	Provinsi		
1	Pembangunan agama dan budaya	RPJP Provinsi 2005-2025	
2	Pembangunan Pemerintahan dan Hukum	RPJP Provinsi 2005-2025	
3	Pembangunan Sumber Daya Manusia	RPJP Provinsi 2005-2025	
4	Pembangunan Ekonomi	RPJP Provinsi 2005-2025	
5	Pembangunan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	RPJP Provinsi 2005-2025	

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Berdasarkan misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021, maka tujuan yang ingin dicapai dengan penyusunan Rencana Kerja (Renja) DLH Tahun 2021 adalah seperti tertuang pada tabel berikut:

Tabel 3.2.
Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran
Renja DLH Tahun 2021

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	Meningkatkan ketersediaan data dan informasi lingkungan, pengkajian dampak lingkungan serta pelayanan penyelesaian sengketa dan penegakan hukum lingkungan	Meningkatnya ketersediaan data dan informasi lingkungan, pengkajian dampak lingkungan serta pelayanan penyelesaian sengketa dan penegakan hukum lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya data inventarisir usaha/ atau kegiatan yang sudah memiliki izin. 2. Jumlah rancangan peraturan daerah yang disusun. 3. Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan LH yg ditindaklanjuti. 4. Persentase ketersediaan informasi SDA dan LH yg dapat diakses oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan (buku dan website)
2	Mengendalikan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.	Terkendalinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Pencemaran Udara. 2. Indeks Pencemaran Air.
3	Menanggulangi kerusakan lingkungan dan meningkatkan kualitas pelayanan laboratorium lingkungan	Tertanggulanginya kerusakan lingkungan dan meningkatnya kualitas pelayanan laboratorium lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air. 2. Jumlah usaha dan/atau kegiatan yg dilaksanakan uji laboratorium kualitas air limbah. 3. Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrative dan teknis pengendalian pencemaran udara 4. Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dilaksanakan uji laboratorium kualitas udara. 5. Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pengawasan dalam

			pelaksanaan kebijakan LH
4	Meningkatkan perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yg telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya. 2. Luasan Mangrove yang dipelihara. 3. Jumlah Bangunan pengaman sungai (Turap Vs Konstruksi Echo Hidraulik) (lokasi). 4. Pengelolaan kehati dan ekositem
5	Meningkatkan kualitas pelayanan kebersihan melalui penyediaan sarana dan prasarana pendukungnya	Meningkatnya kualitas pelayanan kebersihan melalui penyediaan sarana dan prasarana pendukungnya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 2. Cakupan wilayah kecamatan yang dilayani dalam pengangkutan sampah ke TPA. 3. Tersedianya Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)
6	Meningkatkan pembinaan terhadap kelompok Masyarakat Peduli Sampah dan meningkatkan kesadaran Masyarakat dalam pengelolaan persampahan yang ramah lingkungan;	Meningkatnya Pembinaan terhadap kelompok Masyarakat Peduli Sampah dan meningkatkan kesadaran Masyarakat dalam pengelolaan persampahan yang ramah lingkungan;	Jumlah bank sampah berbasis masyarakat dan sekolah minimal 1 per kecamatan
7	Meningkatkan jumlah Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Pasaman Barat	Meningkatnya jumlah Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Pasaman Barat	Mulai tahun 2020 urusan PJU diserahkan ke Dinas Perhubungan
8	Meningkatkan luasan Ruang Terbuka Hijau/Taman Hijau di Kabupaten Pasaman Barat	Meningkatnya luasan Ruang Terbuka Hijau/Taman Hijau di Kabupaten Pasaman Barat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20 % dari luas wilayah perkotaan. 2. Terpeliharanya RTH.

	Pasaman Barat		3. Tersedianya Taman Tematik
9	Meningkatkan pengelolaan kawasan Hutan (Taman Hutan Raya /Tahura)	Meningkatnya pengelolaan kawasan Hutan (Taman Hutan Raya /Tahura)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Naskah Akademis Kelayakan TAHURA PasBar. 2. Ditetapkannya sebahagian areal Gunung Talamau sebagai Taman Hutan Raya.

3.3. Program dan Kegiatan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dijalankan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pasaman Barat mengoptimalkan tugas dan fungsi dinas sebagai lembaga pengelola lingkungan hidup dan kehutanan, baik melalui Bidang Penataan Penaatan PPLH dan Peningkatan Kapasitas; Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; Bidang Kebersihan dan Pertamanan maupun Bidang Kehutanan

Secara umum, rencana program dan kegiatan DLH Pasaman Barat Tahun 2021 tertuang dalam 10 (Sepuluh) program yang terdiri dari 21 (Dua puluh satu) kegiatan, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3.
Program dan Kegiatan Tahun 2021

No.	Program	Kegiatan
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran. 2. Penyediaan pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana perkantoran dan aparatur 3. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi.
2.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	4. Pengadaan pakaian aparatur
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	5. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
4.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	<ol style="list-style-type: none"> 6. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan 7. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan prasarana persampahan. 8. Optimalisasi persiapan penilaian Adipura
5.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 9. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan bidang LH 10. Pengkajian Dampak Lingkungan 11. Penyusunan Kebijakan Pengendalian

		Pencemaran dan Perusakan LH 12. Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Akibat Dugaan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan 13. Pembinaan Sekolah Berbasis LH (Adiwiyata)
6.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	14. Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem 15. Pengendalian dampak perubahan iklim
7.	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan	16. Pengembangan data dan informasi lingkungan
8.	Prorgam Peningkatan Pengendalian Polusi	17. Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri 18. Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair 19. Pengujian kualitas air sungai
9.	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	20. Pemeliharaan RTH
10.	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	21. Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD

Rencana Kerja dan Pendanaan untuk Kegiatan Tahun 2022 merupakan implementasi tahun ke-6 dari Rencana Strategis Tahun 2016-2021 yang secara simultan disusun sebagai dokumen Rencana Kerja Tahunan agar lebih fokus mendukung pencapaian tujuan strategis DLH Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2021, yakni meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah yang diukur melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, program/kegiatan yang dilaksanakan oleh DLH Kab. Pasaman Barat haruslah yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala DLH, sebagai bentuk tanggung jawab terhadap ketercapaian Visi dan Misi Bupati Pasaman Barat. Melalui telahaan terhadap hasil evaluasi terhadap program/kegiatan DLH Kab. Pasaman Barat Tahun 2021 serta memperhatikan isu-isu global maka diperoleh rumusan yang terdiri dari 9 program, 14 kegiatan dan 24 sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DLH Kab. Pasman Barat pada tahun 2021 dengan lokasi kegiatan sebagian besar berada di Kabupaten Pasaman Barat dengan total kebutuhan dana sebesar **Rp.7.299.678.930** (*Tujuh milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah*) sebagaimana disajikan pada Tabel 4.1.

Berdasarkan analisis kebutuhan, rumusan kebutuhan program dan kegiatan DLH Kabupaten Pasaman Barat tahun 2021 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.1.
Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2021

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting (Penjelasan)
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. PasBar	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	100 %	4.400.608.031				4.400.608.031	
	<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	DLH Kab. PasBar	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	4.009.126.981				4.009.126.981	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DLH Kab. PasBar	Jumlah ASN yang mendapat gaji dan tunjangan	39 orang	3.811.076.981				3.811.076.981	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	DLH Kab. PasBar	Jumlah Non PNS (PTT dan THL) penunjang administrasi perkantoran	1 PTT dan 20 THL	122.150.000				122.150.000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi DLH	DLH Kab. PasBar	Penyediaan honorarium petugas pengelola keuangan	12 bulan	75.900.000				75.900.000	
	<i>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	DLH Kab. PasBar	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	53.600.000				53.600.000	

	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	DLH Kab. PasBar	Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan pengamanan BMD pada DLH	2 orang	36.700.000				36.700.000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	DLH Kab. PasBar	Jumlah ASN penatausahaan BMD	1 PNS dan 1 THL	16.900.000				16.900.000	
	<i>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	Kab. PasBar	Jumlah ASN yangmengikuti bintek peningkatan kapasitas	5 orang	7.180.000				7.180.000	
	Bimbingan Teknis Impleentasi Peraturan Perundang-undangan	Kab. PasBar	Jumlah ASN yangmengikuti bintek peningkatan kapasitas	5 orang	7.180.000				7.180.000	
	<i>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	DLH Kab. PasBar	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	143.209.750				143.209.750	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DLH Kab. PasBar	Jumlah pemenuhan kebutuhan penerangan dan instalasi listrik penunjang operasional kantor	1 paket	3.110.000				3.110.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DLH Kab. PasBar	Jumlah ATK dan kertas yang dibutuhkan	1 paket	20.000.000				20.000.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DLH Kab. PasBar	Jumlah blanko SPT, SPPD, kuitansi dan Map DLH yang dibutuhkan	1 paket	9.888.250				9.888.250	

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. PasBar	Jumlah rapat koordinasi dari pemerintah provinsi dan pusat yang diikuti	45 kali	110.211.500				110.211.500	
	<i>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	DLH Kab. PasBar	Cakupan terpenuhinya kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	71.461.300				71.461.300	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DLH Kab. PasBar	Frekuensi penyediaan kebutuhan listrik dan air untuk operasional kantor	12 bulan	43.205.500				43.205.500	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DLH Kab. PasBar	Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan tugas K3 dan penyediaan peralatan penunjang kebersihan kantor	2 orang dan 12 bulan	28.255.800				28.255.800	
	<i>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	DLH Kab. PasBar	Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara	57 unit	116.030.000				116.030.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DLH Kab. PasBar	Jumlah kendaraan dinas yang akan dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajak/KIR	37 unit	64.515.000				64.515.000	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DLH Kab. PasBar	Jumlah kendaraan operasional yang akan dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajak/KIR	15 unit	16.600.000				16.600.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DLH Kab. PasBar	Jumlah alat elektronik yang penunjang operasional administrasi perkantoran yang dipelihara	34 unit	28.715.000				28.715.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DLH Kab. PasBar	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	2 unit	6.200.000				6.200.000	
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Kab. PasBar	Dokumen RPPLH yang disusun	0 dokumen	233.286.300				233.286.300	
	<i>Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota</i>	Kab. PasBar	Dokumen RPPLH yang disusun	0 dokumen	233.286.300				233.286.300	
	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Kab. PasBar	Dokumen RPPLH yang disusun	0 dokumen	233.286.300				233.286.300	Mengakomo dir KLHS RTRW
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN	Kab. PasBar	Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara	55.89 dan 90.34	68.471.750				68.471.750	

	DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		(IKU)							
	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab. PasBar	Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU)	55.89 dan 90.34	68.471.750				68.471.750	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kab. PasBar	Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU)	55.89 dan 90.34	68.471.750				68.471.750	
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Kab. PasBar	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	50.84	808.691.599				808.691.599	
	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Kab. PasBar	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	50.84	808.691.599				808.691.599	
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kab. PasBar	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	50.84	808.691.599				808.691.599	
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN	Kab. PasBar	Persentase verifikasi pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan B3 danLB3	100%	3.773.750				3.773.750	

	BERACUN (LIMBAH B3)								
	<i>Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3</i>	Kab. PasBar	Persentase verifikasi pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan B3 danLB3	100%	3.773.750			3.773.750	
	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kab. PasBar	Jumlah verifikasi lapangan penyimpanan sementara limbah B3	2 objek	3.773.750			3.773.750	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Kab. PasBar	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	93%	96.231.750			96.231.750	
	<i>Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan</i>	Kab. PasBar	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin	93%	96.231.750			96.231.750	

	<i>Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>		lingkungan, izin PPLH dan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota							
	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Kab. PasBar	Jumlah fasilitasi izin lingkungan (IL) dan IPPLH lainnya	5 objek	30.257.250				30.257.250	
	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. PasBar	Jumlah objek yang dibina dan diawasi	49 objek	65.974.500				65.974.500	
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Kab. PasBar	Jumlah penghargaan bidang lingkungan hidup yang diberikan kepada masyarakat	15 penghargaan	23.845.750				23.845.750	
	<i>Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	Kab. PasBar	Jumlah penghargaan bidang lingkungan hidup yang diberikan kepada masyarakat	15 penghargaan	23.845.750				23.845.750	
	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia	Kab. PasBar	Jumlah penghargaan bidang lingkungan hidup yang diberikan	15 penghargaan	23.845.750				23.845.750	

	Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		kepada masyarakat							
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Kab. PasBar	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	27.442.000				27.442.000	
	<i>Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota</i>	Kab. PasBar	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	27.442.000				27.442.000	
	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Kab. PasBar	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	27.442.000				27.442.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Kab. PasBar	Persentase sampah yang tertangani	28,25%	1.637.328.000				1.637.328.000	
	Kegiatan Pengelolaan Sampah	Kab. PasBar	Persentase sampah yang tertangani	28,25%	1.637.328.000				1.637.328.000	
	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kab. PasBar	Persentase sampah yang tertangani	28,25%	1.637.328.000				1.637.328.000	

BAB V

PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja (Renja) DLH Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan pada tahun 2021. Tentu saja, keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang termuat dalam Rencana Kerja ini sangat bergantung kepada komitmen dan kerjasama semua pihak yang terkait. Diperlukan upaya koordinasi yang lebih intens antar semua pihak sehingga program dan kegiatan bisa dilaksanakan dengan baik.

Selain itu, diperlukan komitmen semua pihak terkait tindak lanjut dari segala kegiatan yang dilaksanakan. Mengingat tugas pokok dan fungsi DLH Kabupaten Pasaman Barat sebagai OPD yang bertanggung jawab merumuskan program/kegiatan urusan lingkungan hidup dan kehutanan ke depan, maka tindak lanjut (*follow up*) menjadi suatu keharusan. Dengan demikian, dokumen rencana yang telah disusun tidak hanya sebatas dokumen tanpa implikasi.

Tentu saja, Renja ini membutuhkan umpan balik (*feedback*) yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan perumusan rencana program di masa mendatang. Dengan demikian, program-program pembangunan akan lebih terarah dan bersinergi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik di masa mendatang melalui perencanaan yang terintegrasi.

Padang Tujuh, 2021

Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Pasaman Barat

